

**Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesai Perkara Perdata (Studi Analisis Kasus-
Kasus di Pengadilan Agama Makassar 2012-2014)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh

Muhammad Ilham
NIM. 10500111076

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2015

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perdata (Studi Analisi Kasus-Kasus di Pengadilan Agama Makassar 2012-2014)**” sebagai persyaratan dapat gelar Sarjana Hukum (SH) dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjasa besar membawa umat ke jalan Dienul Islam. Beliau adalah hamba allah SWT yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita kehidupan. Sehingga, atas dasar cinta kepada beliau, penulis mendapat motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang kami peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya. Saya juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu saya ucapkan rasa hormat kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak dan Ibu yang saya hormati dan tercinta bapak H. Usman dan ST. Hawa. Kaka Arifin Sag, MHI, Kaharuddin SHI, Imran Spd dan Marjan, terkasih dan tersayang. Terimakasih saya haturkan kepada mereka semua yang telah membimbing, mencintai, memberikan semangat, harapan, arahan dan motivasi serta memberikan dukungan baik secara materi maupun moril sampai terselesaainya skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya pengganti Prof Dr. H.A Qadir Gassing HT., M.S, selaku Rektor penjabat pengganti sementara sementara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Prof . Dr. H. Ali Parman, M.A, selaku Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ketua jurusan Ilmu Hukum, sekretaris jurusan Ilmu Hukum, serta staf jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dan sehingga saya dapat menyelesaikan semua mata kulia dan skripsi ini
5. Erlina S.H.,M.H selaku pembimbing 1 dan Drs. M. Thahir Maloko, M.HI selaku pembimbing II skripsi ini. Terimakasih saya haturkan segala bimbingan , arahan, dan motivasinya. Semoga beliau serta seluruh anggotanya diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal ' Alamin.

6. Bapak Drs. Moh . Yahya. S.H.,M.H selaku ketua Pengadilan Agama Makassar serta hakim-hakim mediator yang telah memberikan fasilitas waktu, tempat, dan bantuannya. Selama penelitian dan semua pihak yang telah membantu bai moril maupun materil.
7. Dosen-dosen jurusan Ilmu Hukum yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat. Amin.
8. Semua sahabatku pada Ilmu Hukum, khususnya IH 5-6-7 yang saya sayangi dan saya bagakan yang telah membantu selama perkuliahan samapai sekarang ini.

Saya sebagai manusia biasa yang takakan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, saya sangat mengharap kritik dan saran konkrutif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring do,a kepada Allah SWT, saya berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi saya khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan Rhido-Nya. Amin.

Makassar, 11 Maret 2015

Penulis ,

Muhammad Ilham
Nim . 10500111076

ABSTRAK

Nama penyusun : Muhammad Ilham
Nim : 10500111076
Jurusan : Ilmu Hukum
**Judul : Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesai Perkara Perdata
(Studi Analisis Kasus- Kasus di Pengadilan Agama
Makassar 2012-2014)**

Mediasi yang terintegrasi di pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh sebagai instrument untuk mengurangi penumpukan beban perkara di pengadilan, peran aktif para pihak dalam mediasi dengan dibantu oleh mediator yang netral untuk tercapainya proses perdamaian melalui mediasi yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang proses pelaksanaan mediasi di pengadilan yang meliputi tehnik pelaksanaan mediasi, peran hakim dalam mendamaikan para pihak dan kendala yang dihadapi pengadilan serta upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologi atau penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan tentang pelaksanaan hukum di masyarakat dengan menggunakan data primer dan sekunder seperti data diperoleh dengan wawancara, data tidak langsung studi kepustakaan berupa undang-undang, karya ilmiah dan literature lainnya yang mendukung penelitian. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar sampai saat masih mendapat beberapa hambatan dalam mengoptimalkan mediasi dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat hemat dan berbiaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara.

Hal ini diperkuat dari data-data hasil penelitian penulis, dari 2012-2014 di pengadilan agama Makassar menghasilkan 1427 perkara yang dimediasi, yang berhasil di mediasi 44 perkara, dan hampir 70 persen perkara yang masuk di dominasi perkara perceraian dan sisanya perkara lain-lainnya. ada beberapa hambatan yang membuat pengadilan agama Makassar sedikit menyelesaikan perkara lewat putusan damai (mediasi), *pertama* adanya keenggan para pihak hadir pada saat mediasi, *kedua* Fasilitas tidak mendukung kenyamanan para pihak (tempat mediasi) serta jumlah hakim mediator sedikit yang tidak sebanding dengan kasus yang masuk setiap bulannya mencapai ratusan perkara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang lahir akibat adanya kepentingan berbeda. Dengan timbulnya konflik, hukum memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik.¹Konflik pertama dalam sejarah peradaban manusia adalah konflik anak dari Nabi Adam As dan St Hawa yaitu Habil dan Qabil. Habil mempunyai saudara kembar perempuan bernama Iqlimah sedangkan Qabil juga mempunyai saudara kembar perempuan namanya Labuda, semasa kecil (*Qabil-Habil*) keduanya saling menyayangi dan saling menghargai satu sama lain, tetapi keadaan itu berubah ketika mereka mulai dewasa. Nabi Adam sebagai ayah mereka mendapat ilham dari Allah, bahwa anak-anaknya harus dinikahkan dengan cara bersilang, Qabil dengan Labuda sedangkan Habil dengan Iqlimah, keputusan ini di tolak sama Qabil karena dia tidak ingin dinikahkan dengan Labuda karena parasnya kurang cantik.

Nabi Adam As sebagai ayah sekaligus penengah dalam kasus ini terus mencari solusi bagaimana anaknya (*Qabil-Habil*) menerima dengan keputusan tersebut, kemudian diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam As, bahwa anaknya

¹Nurnaningsi Amrini, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.1.

(Qabil dan Habil) untuk berkorban dengan menyerahkan harta yang dimiliki, dengan syarat siapa yang diterima kurbannya oleh Allah, maka dia berhak memilih pasangan hidupnya. Kemudian yang diterima kurbannya oleh Allah adalah Habil dan Qabil pun harus menerima kenyataan bahwa dia tetap sama Labuda. Oleh karena merasa keinginannya tidak terpenuhi Qabil berniat jahat ingin menyingkirkan adiknya Habil dengan membunuhnya.

Nabi Adam selaku penengah selalu memberikan nasehat dan arahan kepada Qabil supaya dia menerima semua ketentuan tersebut, tetapi arahan dan nasehat itu tidak membuat hati Qabil luluh, dia tetap pada pendiriannya, maka Habil pun terbunuh oleh Qabil. Pertikaian Habil dan Qabil diabadikan Allah dalam QS al-Maidah/3:27-31. Dari kisah ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan kearah perdamaian dalam sebuah konflik sudah dipraktekan oleh manusia pertama yaitu Adam As, terhadap keinginan yang berbeda diantara anak-anaknya. tetapi Nabi Adam selaku mediator tidak berhasil mendamaikannya.²

Dalam perjalanan dan perkembangan kehidupan manusia selanjutnya sampai pada abad 21 ini sudah banyak pola atau aturan hukum penyelesain konflik yang melibat pihak ketiga sebagai penengah (mediator) yang dipraktekkan, mulai dari yang bersifat kemasyarakatan (adat), *religious* (agama) maupun penyelesaian secara nasional (kenegaraan). Demikian halnya. Indonesia sebagai sebuah negara yang

² Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.13.

berasas hukum, mengenal tiga penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi yang diakui dalam sistem hukumnya, *pertama* mediasi dalam sistem hukum adat *kedua* mediasi dalam sistem hukum Islam *ketiga* mediasi dalam sistem hukum barat. Dalam perkembangan selanjutnya dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat Indonesia, penyelesaian secara damai (mediasi) dimasukkan dalam bagian hukum acara peradilan.

Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sangat penting sebagai tempat terakhir mencari keadilan dari segala persoalan menyangkut pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat khusus perkara perdata. Sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*)³. Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidak efektifannya sistem pelaksanaan peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta *derdenverzet*. Di sisi lain, masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalistik belaka.

Untuk mengatasi sistem pelaksanaan peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum

³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Cet. II ; Jakarta: Sinar Grafika), h. 3.

acara, didapati pada pasal 130 *Herzine Inlandsch Reglemen* (selanjutnya disebut HIR) maupun pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) dan (2) HIR ⁴

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum mulai persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara baik agar ada titik temu diantara para pihak sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan mengeluarkan biaya mahal. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar 1945 melihat pentingnya pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan. Bertolak dari ketentuan pasal 130 HIR/ pasal 145 R.Bg, Mahkama Agung memodifikasinya kearah yang bersifat memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian, maka terbitnya Surat Edaran Mahakama Agung (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 01 tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR). Tujuan penerbitan SEMA adalah membatasi perkara secara substansif dan prosedural. Apabila perkara tingkat pertama

⁴R Tresmen, *komentar HIR* (Cet. XVII; Jakarta: Paramita, 2005), h. 110.

mampu menyelesaikan melalui perdamaian maka akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

Belum genap 2 (dua) tahun usia SEMA Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 yang berjudul Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konsideral huruf d dikatakan salah satu alasan mengapa PERMA diterbitkan, karena SEMA Nomor 01 Tahun 2002 belum lengkap. Atas alasan itulah SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan akibat SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksa penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian. Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai PERMA Nomor 02 tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di pengadilan, Mahkamah Agung merevisi PERMA Nomor 02 tahun 2003 menjadi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam konsideral huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan biaya ringan, serta dapat memberikan akses, yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di

pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukkan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa disamping proses Pengadilan yang bersifat memutuskan (*ajudikatif*)⁵.

Demikian hal nya dalam ajaran Islam, mediasi dikenal dengan istilah Islah yaitu memutuskan suatu persengketaan dengan cara damai, sedangkan menurut istilah syara' Islah adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Dimaksudkan adalah mengahiri suatu persengketaan dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian. Dengan demikian, pertentangan itu apabila berkempanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu Islah mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan. Mendamaikan dalam Islam berdasarkan Firman Allah QS Al- Hujarat/49:9.

تَبْغِ حَتَّى تَفِيَّ أَمْرَ اللَّهِ . حُوايَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَإِنْ إِيحَدَهُمَا
الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَأَصْلَحُوا ابَيْنَهُمَا .

Terjemahnya

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), jika golongan

⁵Konsideral butir b, Peraturan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

itu kembali pada perintah Allah, maka damaikan diantara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.⁶

Ayat tersebut menjelaskan agar mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah. Namun tidak dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan, Perdamaian harus kesepakatan dari kedua belah pihak. Selain itu mendamaikan dalam Islam terdapat pada juga pada Hadist, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّلَّةُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى سِرِّ وَطَنِهِمْ إِلَّا شَرَّ طَا حَرَّمَ حَدَلًا وَ أَحَلَّ حَرَّمًا

Artinya:

Dari Amar bin Auf Al Muzanni r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda “antara sesama muslim boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim wajib berpegang pada syarat-syarat yang menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram”.(H.R. Tamizi dan hadis ini disahihkan).⁷

Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik didepan Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Islah memberikan kesempatan para pihak memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidaklah patut secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa bisa diakhiri. Islam menganjurkan memilih Islah

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan), h. 744.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Cet. 1; Bandung : Jabar, 2011), h. 218.

sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pertimbangan bahwa Islah dapat memuaskan para pihak sehingga dalam berperkara tidak ada pihak yang merasa menang dan tidak ada pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa.

Peradilan Agama sebagai wujud Peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep Islah yang merupakan ajaran Islam. Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai dan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhiri atas keputusan kedua belah pihak. Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perkara dan menyerderhanakan prosedural pelaksanaan mediasi di pengadilan maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi. Tujuan ini untuk menganalisa ''Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Analisis Kasus-Kasus Pengadilan Agama Makassar 2009-2014).

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini menjadi fokus permasalahan yakni bagaimana landasan hukum tentang mediasi di Pengadilan dan bagaimana pelaksanaan mediasi terhadap menyelesaikan perkara dalam penyelesaian kasus-kasus di Pengadilan Agama Makassar 2012-2014, berapa banyak kasus-kasus yang masuk dari 2012-2014 dan. Berapa yang berhasil di mediasi.

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah teknis yang terkandung dalam judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini sebagai variabel yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas oleh pejabat Peradilan Agama yang mengarah pada menyelesaikan kasus-kasus melalui mediasi.
- b. Mediasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.
- c. Penyelesaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mengarahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mufakat demi terciptanya kata sepakat yang menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Perkara perdata adalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban perintah dan larangan.
- e. Kasus-kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persolan atau kejadian yang diajukan dan diproses di Pengadilan Agama Makassar.

- f. Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadilan yang mengadili sengketa- sengketa perdata orang-orang beragama Islam yang berdomisili di kota makassar.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum tentang mediasi ?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Makassar?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai pelaksanaan mediasi. Menurut beberapa ahli dalam bukunya. Dalam hal ini beberapa literatur yang penulis temukan antara lain.

Susanti Adi Nugroh dalam bukunya yang berjudul Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam buku ini menguraikan mengenai prinsip-prinsip mediasi, proses mediasi, tehnik tehnik dalam bernegosiasi, Sedangkan penulis membahas pada persoalan, mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan,

memfokuskan pada peran mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Nurnaningsi Amriana dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Beliau memberikan gambaran tentang alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, negosiasi, konsiliasi, dengan meletakkan utama pada mediasi. Kemudian membahas mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan Perundang-Undangan yang ada. Lebih lanjut dibahas pula mengenai potensi pengembangannya serta analisis PERMA No 1 Tahun 2008 dan hambatan penerapannya. Sedangkan penulis membahas pada wilayah peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mediasi di pengadilan.

Sedangkan Takdir Rahmadi dalam bukunya berjudul *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Buku ini menelaah mediasi dari aspek konseptual dan struktural, serta keterampilan mediator (*mediasi skill*). Faktor-faktor konseptual dan strukturalnya antara lain, pengertian, persamaan, dan pemberyaan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, kekuatan dan kelemahan, variasi penerapannya serta faktor-faktor budaya yang kuat yang mendorong mediasi dapat berlangsung. Sedangkan penulis membahas mediasi dalam kaitanya dengan penerapannya di Pengadilan Agama Makassar, dan berbagai landasan yuridisnya, dan efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Makassar.

E..Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur mediasi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam penerapan pada sistem peradilan perdata

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengintegrasian mediasi didalam penyelesaian perkara di pengadilan Agama.

c. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pola berpikir kritis serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengetian Dan Landasan Yuridis Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara *etimologi*, istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti berada di tengah.¹ Makna ini menunjuk pada peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak, juga bermakna pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Sedangkan definisi mediasi secara *terminologi* banyak para ahli mengemukakannya diantaranya yaitu:

- a. ***Jimmy Joses Sembiring***, mengemukakan Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.²

¹John Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 175.

²Jimmy Josep Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan (Negosiasi, konsiliasi & Arbitrase)* (Cet. 1; Jakarta: Visimedia, 2011), h. 27.

- b. **Suharto** (mantan hakim agung), mengemukakan Mediasi dapat diartikan secara luas, penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar sistem peradilan, yaitu dengan mediasi, arbitrase, dan lainnya.³
- c. **Tolberg** dan **Taylor** mengemukakan mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan dapat mempercayai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.⁴
- d. **Gary Goodpaster** mengemukakan mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah di mana *pihak* luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
- e. **Takdir Rahmadi**, menurutnya mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁵

³Wiwi Ismiati, "Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur", Thesis (Universitas Islam Jakarta, 2011), h. 19.

⁴Edi As ' Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 3.

⁵Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12.

- f. **Priyatna**, mediasi menurutnya adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen bertindak sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat

2. Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan

Adapun sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis untuk menerapkan mediasi di pengadilan adalah.

- a. HIR Pasal 130 dan RBg 154 BW Ayat (1); Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka. Ayat (2); Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surta mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa Ayat (3); Keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding. Ayat(4); Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut dituruti untuk itu.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Pasal 65 dan 82, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144.
- c. Dalam pasal-pasal tersebut di atas, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, dalam upaya mendamaikan itu pula hakim wajib menghadirkan pihak didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar kedua belah pihak itu rukun dan damai kembali. Apabila upaya mendamaikan yang telah dilakukan secara optimal ini tidak berhasil, maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai.
- d. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI untuk memberdayakan pasal- pasal tersebut awalnya telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang pada akhirnya disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. *Asas-Asas Hukum Perdata di Pengadilan*

1. Asas Perdamaian

Jika kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) hadir dipersidangan, maka majelis hakim dalam setiap kesempatan selalu mengupayakan agar terjadi perdamaian antara para pihak yang berperkara. Hal merupakan anjuran dari Pasal 130 HIR/ 154 Rbg

2. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah

asas sederhana, cepat, biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu para perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama

Maksud dari pada kalimat “ sederhana” dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaan mengadili para pihak yang sedang berperkara didalam memeberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi. Diupayakan memakai bahasa (kalimat) yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa. Jika para pihak mempertahankan kehendaknya dan tidak ingin damai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan.” Cepat “ dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan supaya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan

para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu tidak terlalu lama antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya.

3. Asas Hakim Bersifat Menunggu

Nemo judex sine actor/ Judex Ne Pralebat Ex Officio dan *Who Kein Klanger Ist, Ist Kein Richter*⁶. Kedua istilah ini mengandung makna sebagai berikut: kalau tidak ada penuntut maka tidak ada hakim, namun sekali perkara itu diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dengan dalil hukum tidak mengatur.

4. Asas Hakim Bersifat Pasif

bersifat pasif adalah bahwa perkara yang diajukan di pengadilan inisiatif tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara bukan kepada hakim pemeriksa perkara. Sebelum perkara diajukan ke pengadilan hakim bersifat pasif, sedangkan jika suatu perkara yang dihadapi oleh para pihak telah diajukan ke persidangan pengadilan, maka hakim harus bersifat aktif untuk mengadili perkara tersebut seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Jadi asas hakim bersifat pasif disini batasan hanya pada perkara yang belum diajukan ke pengadilan, setelah perkara diajukan ke pengadilan batasan tersebut telah hilang dan berubah menjadi bersifat

⁶ Fathur Rizqi, "Asas-Asas Hukum Perdata", Mimbar .Com, 05 April 2013. <http://www.Mimbar.com>.(Diakses 5 November 2014).

aktif untuk mengadili perkara sesuai dengan tuntutan yang diajukan pihak penggugat.⁷

5. Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Asas mendengar kedua belah pihak(*audiatur et altera pars* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede*) adalah hakim dalam menanggapi suatu perkara para pihak yang sedang perkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak.

6. Asas Bebas Dari Campur Tangan Para Pihak Diluar Pengadilan

Asas bebas dari campur tangan dari para pihak diluar pengadilan adalah hakim didalam pengadilan dalam memberikan keputusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh para pihak lain di pengadilan

7. Asas Sifat Terbukanya Persidangan

Asas sifat terbukanya persidangan adalah hakim didalam mengadili suatu perkara yang diajukan penggugat, persidangan terbuka untuk umum. Asas terbukanya persidangan dalam menangani suatu perkara- perkara yang diajukan ke pengadilan haruslah terbuka untuk umum karena jika ternyata hakim dalam menangani suatu perkara tidak terbuka untuk umum, keputusan yang dibuat oleh

⁷ Suswanto. "*Hukum Acara Perdata Praktek Dan Teori*"

hakim tidak sah atau cacat hukum serta batal demi hukum (Pasal 13 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

8. Asas Putusan Harus Dilaksanakan 14 (empat belas) Hari Lewat.

Asas putusan harus dilaksanakan setelah 14 (empat belas) hari lewat adalah setiap putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 14 (empat belas) telah lewat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau tidak ada upaya hukum lain dari pihak yang dikalahkan, kecuali dalam putusan ” *profisionil* dan putusan *uit voerbar bij voorraad*”

9. Asas Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan atau *Rasio Decidenti* atau *Basic Reason*.

Asas putusan harus disertai alasan-alasan adalah keputusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan dasar hukum yang tepat.

10. Asas Perkara Dikenakan Biaya

Asas perkara dikenakan biaya adalah para pihak yang beracara di pengadilan dikenakan dengan biaya perkara. biaya perkara ini umumnya dapat berupa biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan, dan biaya meterai. Biaya biaya tersebut sangat diperlukan oleh pengadilan untuk mempelancar pesidangan, khususnya untuk pemanggilan dan pemberitahuan para pihak yang berperkara di pengadilan berkara pengadilan.

C. *Prosedur Mediasi.*

Prosedur adalah ketentuan- ketentuan tentang tahapan dan tata cara atau langkah-langkah melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tahapan dan tata cara penggunaan mediasi dalam tiga konteks. Konteks *pertama*, penggunaan mediasi pada awal persidangan sebagai penguatan upaya perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR dan 154Rbg. Konteks *kedua*, kegunaan mediasi setelah upaya mediasi awal gagal dan perkara telah memasuki tahap pemeriksaan oleh hakim. Konteks *ketiga* penguatan hasil mediasi diluar pengadilan oleh hakim. Namun, sebagian besar ketentuan- ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 lebih kaitkan mediasi dalam konteks pertama. Prosedur mediasi dapat dibedakan atas enam ketentuan-ketentuan, yaitu:⁸

1. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi meliputi langkah- langkah berikut.

- a. Hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1.
- b. Hakim ketua menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

⁸ Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 183.

- c. Paling lama tiga hari para pihak diberi kesempatan memilih mediator di antara pilihan-pilihan yang tersedia sesuai pasal 8 ayat (1)
- d. Jika dalam waktu tiga hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim yang bukan memeriksa pokok perkara.

2. Tahap Proses Mediasi.

- a. Penyerahan dokumen oleh para pihak kepada mediator

Setelah tahap pra mediasi dilalui oleh para pihak dan oleh majelis hakim mediatornya sudah ditetapkan. Maka proses mediasi bisa dilakukan. Adapun batas waktu paling lama yang dapat diberikan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi adalah 40 (empat puluh) dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 40 hari, ini berlaku baik mediator yang ditunjuk adalah mediator di luar pengadilan maupun mediator dari daftar mediator yang ditetapkan majelis hakim dihitung sejak mediator ditetapkan. Sejak itu, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak mediator ditetapkan, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain (pihak lawannya) dan kepada mediator. Jadi, disamping menyerahkan dokumen kepada mediator, para pihak juga menyerahkan dokumen secara timbal balik. Adapun resume yang dimaksud antara lain adalah substansi sengketa perkara yang menjadi obyek perselisihan, yang menurut Yahya Harahap meliputi:

- 1) Masalah yang disengketakan,
- 2) Foto copy surat-surat yang diperlukan, dalam hal ini termasuk surat surat yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti,
- 3) Penyelesaian yang diinginkan,
- 4) Ganti rugi tau pemulihan yang diminta.
- 5). Pembuatan Jadwal Pertemuan Oleh Mediator

Setelah mediator mendapatkan resume yang dibutuhkan, selanjutnya mediator harus membuat jadwal pertemuan dan mengorganisir pertemuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam jadwal. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan bersama para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.⁴² Dalam pertemuan-pertemuan itulah proses mediasi berjalan.

c Pertemuan-Pertemuan

Kecuali yang menjadi obyek pada sengketanya bersifat publik, pertemuan mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, akan tetapi jika para pihak menghendaki agar pertemuan mediasi terbuka untuk umum, maka pertemuan mediasi dapat juga dilakukan dengan terbuka untuk umum. Dalam hal obyek sengketanya bersifat publik atau terkait secara langsung dengan kepentingan publik, pertemuan mediasi tidak boleh tertutup untuk umum. Jadi dalam hal sengketa yang obyeknya bersifat privat murni (tidak memiliki dampak langsung ke publik), misalnya :

perkara pembatalan merek dan perselisihan tentang Hak Kekayaan Intelektual, hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan (*konfidensial*) proses sengketa perkara itu sendiri. Secara otomatis publikasi-publikasi proses mediasi tidak dapat dilakukan, baik oleh para pihak maupun mediator.

Namun jika para pihak menghendaki agar proses mediasi terbuka untuk umum maka proses mediasi bisa saja dinyatakan terbuka untuk umum. Sedangkan dalam hal sengketa itu adalah sengketa publik, maka proses mediasinya mutlak terbuka untuk umum, dalam arti bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan dengan cara tertutup.

Adapun yang dimaksud dengan sengketa publik dalam hal ini antara lain: Sengketa lingkungan, Sengketa hak asasi manusia, Perlindungan konsumen, Pertanahan, Perburuhan yang melibatkan banyak buruh.

Dalam memimpin pertemuan antar para pihak tersebut mediator dapat membuat pertemuan khusus dengan salah satu pihak (*kaukus*). Sekalipun demikian, mediator harus berhati-hati untuk itu, karena pertemuan sepihak bisa memicu munculnya kecurigaan salah satu pihak yang selanjutnya bisa berakibat fatal. Jika salah satu pihak tidak percaya lagi pada mediator, proses mediasi bisa gagal. Selain berhak membuat *kaukus* dalam proses mediasi, dengan persetujuan para pihak mediator juga berhak untuk mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak, jika dibutuhkan.

Mediator juga harus selektif dan mengetahui betul bahwa para ahli yang hendak dilibatkan itu adalah para ahli yang keahliannya berhubungan langsung dengan pokok persoalan dan dapat mengurangi perbedaan antar para pihak.

d Perumusan kesepakatan dalam bentuk tertulis

Jika dalam waktu yang ditentukan para pihak kemudian dapat mencapai kata sepakat tentang bentuk penyelesaian sengketa, maka para pihak wajib merumuskan kesepakatan dan dengan dibantu oleh mediator menuangkan rumusan kesepakatan tersebut kedalam bentuk tulisan. Sifat tertulis ini adalah keharusan dalam proses perdamaian. Selanjutnya, setelah kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan, mediator berkewajiban untuk memeriksa kembali kesepakatan itu untuk mencegah adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam hal ini bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya ditanda tangani oleh para pihak dan dapat saja berbentuk akta dibawah tangan atau akta otentik, akta yang dibuat didepan notaris. Selain itu, satu hal penting yang juga harus tercantum dalam nota kesepakatan itu adalah klausula para pihak akan mencabut gugatannya dan pernyataan perkara telah selesai.

3. Proses Mediasi yang Menghasilkan Kesepakatan Damai.

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan

perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mewajibkan para pihak untuk:

- a. Merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis dan mendatangkannya.
- b. Menyatakan persetujuan secara tertulis atas kesepakatan perdamaian jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum.
- c. Menghadap kembali pada hakim pada sidang yang ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

4. Proses Mediasi yang Gagal Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian.

Dalam konteks peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, kegagalan mediasi dapat terjadi karena dua kemungkinan atau kondisi.

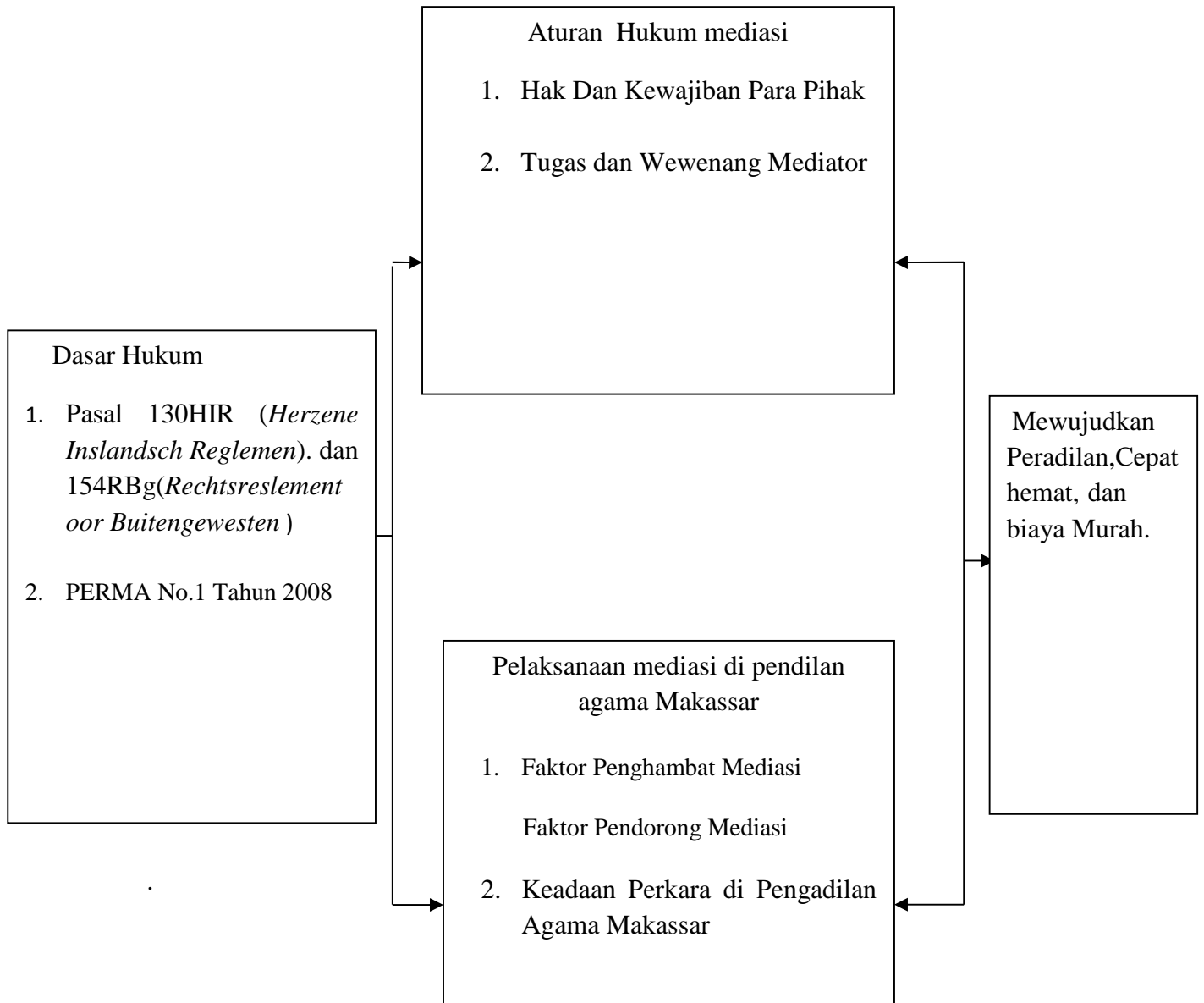
- a. Mediasi dianggap gagal jika setelah batas waktu maksimal ditentukan, yaitu empat puluh hari atau waktu perpanjangan empat belas hari telah terpenuhi, namun para pihak belum juga menghasilkan kesepakatan. Jika kondisi ini terjadi, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan memberitahukan kepada hakim pemeriksa. Selanjutnya hakim memeriksa perkara sesuai dengan ketentuan acara yang berlaku.
- b. Mediator juga memiliki wewenang untuk menyatakan mediasi telah gagal meski batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi

situasi, sebagai dinyatakan dalam Pasal 14 ayat 1 dan dua Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

5. Prosedur Pengulangan Mediasi

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengandung semangat untuk terus memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa secara perdamaian pada tiap tahapan pemeriksaan setelah kegagalan mediasi pada awal. Semangat ini tercermin pada Pasal 18 ayat (3). Para pihak juga diperbolehkan untuk menempuh perdamaian atas perkara mereka yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali.

D.. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan hukum sosiologi atau yuridis empiris . Penelitian sosiologis adalah suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi lapangan. Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dengan pedoman pada aturan hukum yang berlaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial) sehingga dapat diperoleh kejelasan dari persidangan di pengadilan.

B. Pendekatan Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberi data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti, dan ini menggambarkan pengaturan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 02 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008.

C. Sumber Data

a. Penelitian Pustaka (library research)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang menggunakan bahan hukum

b. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari: Undang – Undang dasar Negara Indonesia tahun 1945, *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsrelement voor de Buitengewesten* (R.Bg), PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

Primer, yang terdiri dari: Buku-buku, majalah hukum, artikel ilmiah, Arsip-arsip yang mendukung dan publikasi dari lembaga terkait.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi

Bibliografi, Ensiklopedia, Kamus hukum

e. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti obyek peneliti tersebut.

1. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di pengadilan Agama Makassar, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini ditempat tersebut. Dalam hal ini mengenai efektifitas pelaksanaan mediasi dilokasi tersebut.

2. Subjek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu bertanggungjawab secara prosedural, maka yang tepat dijadikan rujukan adalah hakim yang ditunjuk sebagai mediator itu sendiri dari para pihak yang pernah menjalani proses mediasi dan hakim pengadilan Agama

Makassar yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalanya proses mediasi

D. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ,yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok masalah. Kepustakaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan lain- lain sumber.

b. Wawancara (*Interviem*).

Wawancara atau interview yaitu Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau intervie sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan (*Responden*)

Wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim yang ditunjuk sebagai mediator dan para pihak yang melaksanakan mediasi di pengadilan agama Makassar yang mampu mengkaji, mengetahui serta memeriksa sekaligus memutuskan jalan proses mediasi.

c. Dokumen

Dokumen salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data-data bersumberkan pada dokumen-dokumen arsip-arsip yang ada dipengadialn agama Makassar

E. Tehnik Pengelohan dan Analisis Data.

Sebelum dianalisa maka perlu dilakukan proses pengelohan data terlibi dahulu mana data yang relevan dan yang tidak .pengelohan data mulai dari editing, klasifikasi, verfikasi, analisis, dan kesimpulan adapun penjelasanya sebagai berikut:

a. Editing.

Merupakan langkah pertama dalam pengolahan data yang dilakukan peneliti. Melakukan peneliti kembali atas data-data yang diperoleh dari lapanga, baik primen maupun sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dipengadilan dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna, dan kesesuai dengan data yang diperlukan.

b. Klasifikasi.

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelempokan) dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagoritertentu.

c. Verifikasi.

Verifikasi adalah dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini sama penting dilakukan dengan menjawab untuk menjawab pertanyaan peneliti.

d. Analisis.

Analitis adalah proses penyerdeharnaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi.

e. Kesimpulan.

Kesimpulan langkah terakhir dalam pengelolaan data ini yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Aturan Hukum Mediasi

1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Dalam PERMA No.1 tahun 2002 telah diberikan beberapa ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan, salah satunya memberikan hak serta kewajiban bagi para pihak yang menempuh penyelesaian melalui perdamaian melalui mediasi. Apabila para pihak setuju menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi, maka mejelis hakim akan menyediakan mediator bagi mereka. Akan tetapi Perma ini tidak mengharuskan para pihak untuk menempuh jalur mediasi artinya mediasi itu lebih kepada inisiatif dan sukarela para pihak.

Dalam perkembangan selanjutnya PERMA No 1 Tahun 2002 diganti dengan PERMA No 2 Tahun 2003 untuk mendorong atau memberdayakan mediasi di pengadilan, salah poin yang ditambah dalam pasal ini, adalah keharusan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 2 ayat 1). Beberapa tahun kemudian Mahkamah Agung merevisi atau mengganti dengan Perma No 1 Tahun 2008, dalam isi Perma ini lebih ditegaskan lagi bagi para hakim untuk menempuh mediasi dan bila mediasi tidak dilaksanakan maka putusan bisa batal demi hukum, serta hak dan kewajiban para pihak lebih ditegaskan lagi dalam PERMA No Tahun 2008 ini.

a. Hak Para Pihak

Dalam peraturan Mahkamah Agung PERMA No. 1 Tahun 2008, para pihak diberikan otonomi, artinya para pihak diberikan kebebasan dalam menjalani proses mediasi yang nyaman bagi kedua belah pihak. Prinsip otonomi juga kadang-kadang disebut dengan *self determination*, yaitu para pihaklah yang berhak atau berwenang untuk menentukan dalam arti menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses mediasi. Seperti Dalam Pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2008 para pihak diberikan hak untuk memilih mediator yang akan menengahi perkara mereka diantara para mediator itu dengan ketentuan,:

- 1) Hakim bukan pemeriksa perkara dalam pengadilan yang bersangkutan
- 2) Advokat atau akademis hukum
- 3) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai dan berpengalaman dalam pokok sengketa
- 4) Hakim mejelis pemeriksa perkara
- 5) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir 1 dan 4, atau gabungan butir 2 dan 4, atau gabungan butir 3 dan 4.

Mediator sebagai pihak netral tidak berwenang untuk menentukan dan memaksakan suatu hal baik yang bersifat prosedural maupun substantial dalam proses mediasi. Prinsip otonomi para pihak dalam proses mediasi mengandung arti bahwa salah satu pihak atau para pihak tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk

¹menerima usulan-usulan dan syarat syarat kesepakatan perdamaian. Kesepakatan damai haruslah merupakan hal-hal yang diterima atau disepakati oleh para pihak. Jika terjadi penekanan oleh mediator dan apa lagi pemaksaan oleh satu pihak terhadap pihak lain atau oleh mediator kepada salah satu atau para pihak untuk menerima usulan atau syarat-syarat tertentu, maka proses itu tidak dapat disebut sebagai proses mediasi, karena bertentangan dengan perasaan, keinginan dan kebutuhan para pihak. Kenyataan yang terjadi pengadilan Agama Makassar dalam hal memilih mediator, para pihak jarang diberikan hak untuk memilih mediator dalam menyelesaikan sengketa. Para pihak pada saat dipanggil untuk melakukan proses mediasi, mereka langsung keruangan mediasi dan disana ada hakim mediator yang menunggu.² Selanjutnya para pihak mempunyai hak untuk menarik diri dari proses mediasi bilamana salah satu pihak atau lawannya tidak beriktikad baik dalam proses mediasi (Pasal 12 Ayat 2).

Para pihak berhak menghendaki proses mediasi terbuka atau tertutup. Selain itu atas dasar kesepakatan, para pihak berhak memperpanjang jangka waktu mediasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagai dimaksud dalam ayat 3 (Pasal 13 Ayat 4). Para pihak juga berhak mendapatkan akta perdamaian yaitu akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan damai

¹Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 156.

² Hasil Wawancara Dengan Para Pihak Tanggal 17-18 Desember 2014

yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa dari pengadilan, bilamana dalam perundingan para pihak bersepakat dengan isi dan syarat-syarat yang diminta diantara keduanya. Selanjutnya jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, maka perdamaian akan dituangkan dalam bentuk pencabutan gugatan atau hakim (mediator) menyatakan perkara telah selesai (Pasal 17 Ayat 5 dan 6)

Dalam PERMA No. 1 tahun 2008 memberikan hak bagi para pihak, atas dasar kesepakatan mereka juga dapat menempuh mediasi upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding,kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang mengadili (Pasal 21 Ay at 1 dan 2)

b. Kewajiban Para Pihak.

PERMA No 1 Tahun 2008 selain memberikan hak-hak bagi para pihak membebani pula kewajiban. Kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak yang menempuh proses mediasi diantaranya, biaya pemanggilan para pihak. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara, selanjut bila para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak

sebagaimana dalam ayat 1 ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak. Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam prose mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara. (Pasal 3 Ayat 1,2 dan,3) ³

Kemudian kewajiban para pihak yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2008 adalah menempuh proses mediasi dengan iktikad baik (Pasal 12 Ayat 1), setelah ada iktikad baik dari para pihak, dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah menunjuk mediator yang disepakati, masing- masing pihak wajib menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator, selanjut dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada kepada hakim mediator yang ditunjuk (Pasal 13 Ayat 1 dan 2). Selanjutnya para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai, para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian(Pasal 17 Ayat 1,2 dan 4).

³ Susanti Adi Nugroho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Cet 1; Jakarta :PT Telaga Ilmu, 2009), h. 342.

2. Tugas dan wewenang mediator

a. Tugas mediator.

Seorang mediator mempunyai tugas diantaranya:

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- 2) Meditor wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediator.
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan mengali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. (Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008)

Jika setelah batas waktu maksimal empat puluh hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 PERMA No.1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera dalam pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud diatas, berlangsung paling lama empat belas hari kerja sejak hari para pihak

menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan. (Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2008.⁴

b. Wewenang Mediator

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukuman telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.(Pasal 13 No. 1 Tahun 2008)

Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak . (pasal 14 PERMA No.1 Tahun 2008)

⁴ Nurnaningsi Amrini, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.151-152.

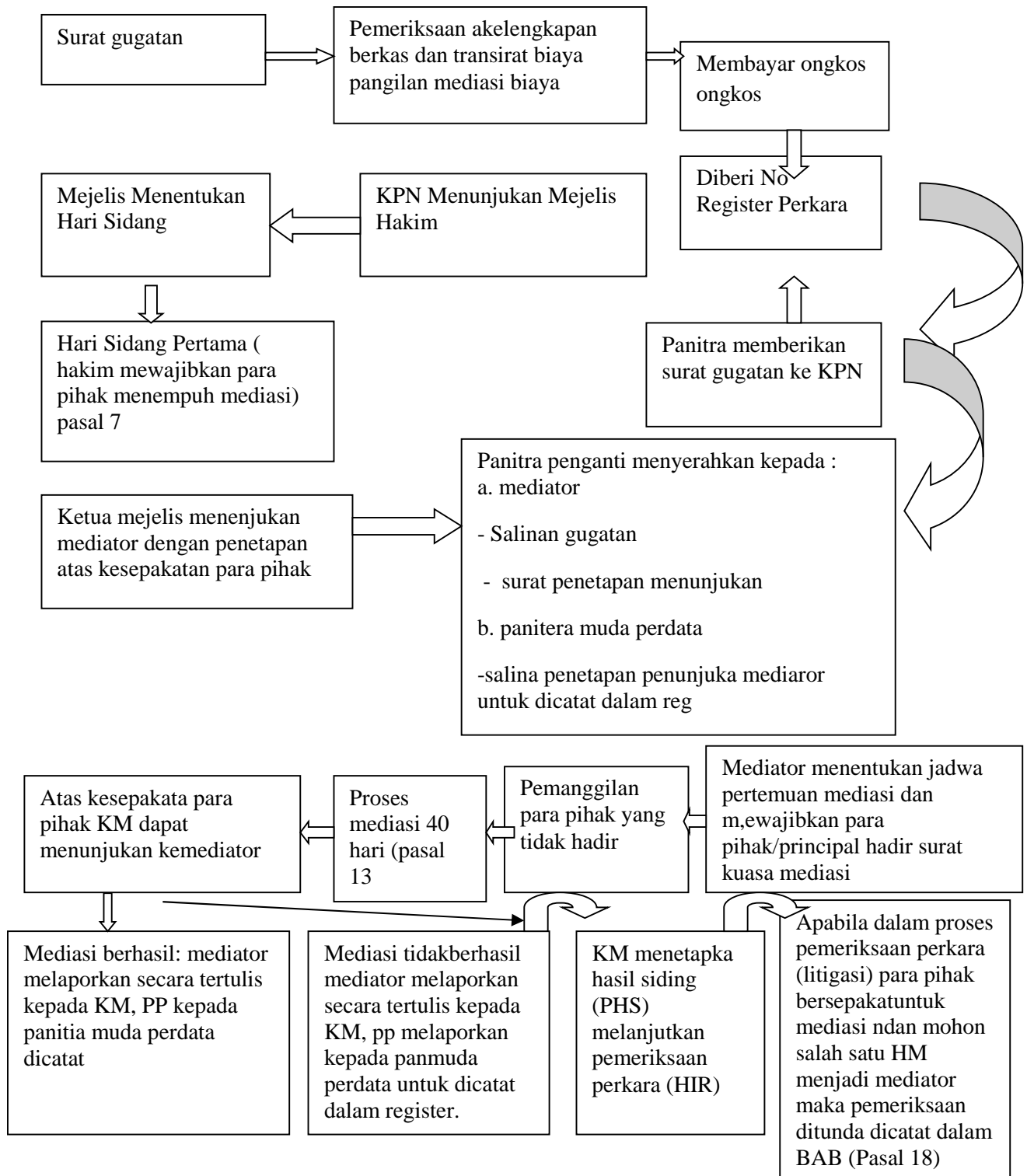
Berdasarkan kesepakatan para pihak atau kuasa hukumnya, mediator dapat mengundang seorang ahli atau lebih untuk memberikan penilaian, penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat antara para pihak. Untuk menghindari masalah baru menyangkut pendapat ahli, maka para pihak harus bersepakat terlebih dahulu, apakah pendapat ahli akan dianggap mengikat atau tidak (format terlampir) (Pasal 16 PERMA No.Tahun 2008)

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai

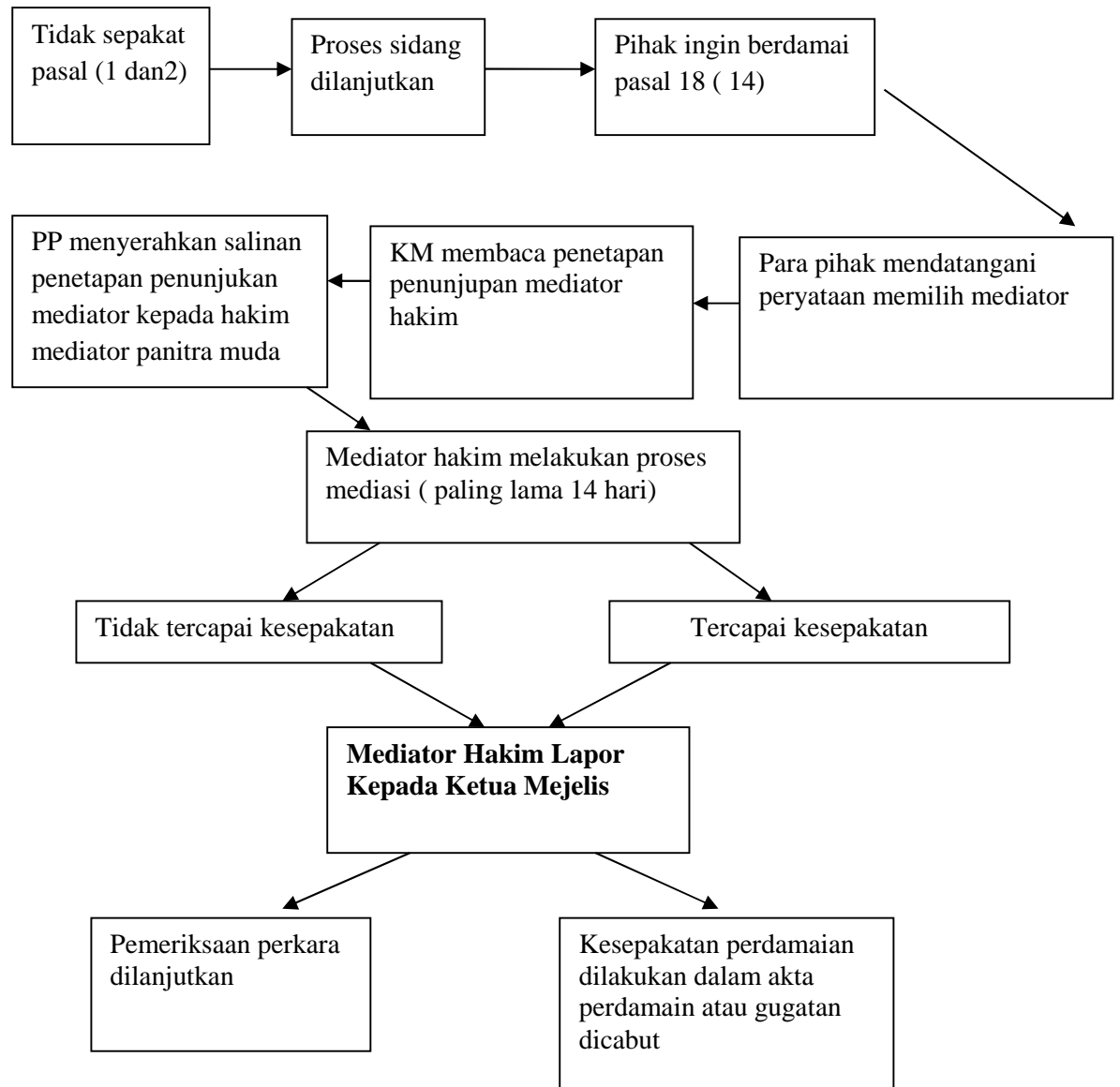
Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa meteri kesepakatan untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, persepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan

perkara telah selesai.(Pasal 17 PEMA No. 1 Tahun 2008). Adapun alur penyelesaian sengketa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 serta alur mediasi yang sudah masuk dalam tahap litigasi sebagai berikut.

Alur Mediasi Awal Litigasi



Alur penyelesaian sengketa yang sudah masuk dalam tahap litigasi



Sumber: Data Pengadilan Agama Makassar 2014

B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar

Dari serangkaian proses mediasi di pengadilan agama Makassar , di samping masih menyisakan beberapa kelemahan-kelemahan, proses mediasi dipengadilan juga masih mengandung sejumlah kerancuan terutama prosedur pra mediasi yang yang menjadi faktor penghambat, dilain pihak juga ada beberapa keadaan yang mempermudah proses pelaksanaan mediasi yang menjadi faktor pendorong pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Makassar.

1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Mediaisi

Dengan dikeluarkannya oleh Mahkamah Agung PERMA No.1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan PERMA No 1. Tahun 2003, maka Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama wajib menerapkan mediasi dalam proses beracara, tujuannya agar mewujudkan peradilan cepat, hemat dan berbiaya murah. Akan Tetapi dalam pelaksanaan mediasi khususnya pengadilan Agama Makassar ada beberapa faktor yang mendorong dan memperhambat pelaksanaan mediasi.

a. Faktor-Faktor Pendorong Terlaksananya Mediasi

Setidaknya dari hasil pengamatan penulis baik dari data-data maupun dari pengamatan secara langsung dilapangan ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Makassar. Salah satu

faktor penting adalah iktikad baik. Iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi, karena tanpa adanya iktikad baik para pihak tidak akan tercapai. Selain itu, sengketa hukum yang memberikan peluang adanya tawar-menawar dalam sebuah proses perundingan juga memudahkan berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi. Semua jenis sengketa perdata tentunya mudah untuk dapat diselesaikan melalui proses mediasi, asalkan saja tidak berkaitan dengan validitas keabsahan atau keabsahan putusan. Sehingga peran pengadilan tingkat pertama dalam konteks ini adalah menentukan keputusan. Faktor lain yang menunjang keberhasilan mediasi adalah peran hakim mediator yang sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian..

a). Iktikad Baik Para Pihak.

Iktikad baik sangatlah penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapainya kesepakatan yang *win-win solution*. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai. Di pengadilan agama iktikad baik para pihak sangat mendorong terjadinya mediasi, hal ini bisa dilihat dari perkara perceraian yang dimediasi.

Didalam perkara cerai gugat yang tertuang dalam akta perdamaian pengadilan Agama Makassar Nomor/Pdt.6/2014 PA. Mks.tanggal 8 Desember 2014 dapat dilihat itikad baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam perkara tersebut untuk dapat menyelesaikan percereian diantara mereka dengan damai, karena penggugat masih berharap pihak tergugat bisa merubah sikapnya dan pihak tergugat memberikan pernyataan, dia tidak akan melakukan kesalahan lagi.

b). Peran Hakim Mediator

Keahlian hakim sebagai mediator tidak bisa dilupakan, karena hakim dapat mendorong agar pihak-pihak yang berseteru tercapai perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 menugaskan hakim mediator untuk membantu dan mendorong para pihak dalam perkara perdata yang menjalankan proses mediasi. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan budaya bangsa Indonesia. Namun akan tetap lebih baik dan lebih adil jika hasil perdamaian dilakukan dengan musyawarah mufakat. Oleh karena dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adinya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah dan sebaliknya akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang.

Lain halnya dengan hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah (mereka sama menang dan sama-sama kalah)

Di Pengadilan Agama Makassar peran hakim sebagai mediator sudah cukup baik, dalam hal memberikan saran-saran yang baik untuk kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan wawancara penulis dengan para pihak dalam perkara yang sudah melewati proses mediasi, 8 (delapan) dari 10 dari pihak bersengketa menyatakan, hakim sudah baik dalam menyelesaikan sengketa.

Peran aktif mediator juga bisa dilihat dalam salah satu perkara cerai gugat yang dimediasi di Pengadilan Agama Makassar. Dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Andi Nilawati (penggugat) kepada Muh.Ishak Misbah(tergugat) Nomor Perkara 1877/Pdt 6/2014 PA.Mks, tanggal 15 Desember 2014 dengan mediator Drs. H.Arif Musi SH. Pada awal-awal pertemuan mediasi, penggugat (istri) ingin sekali mengahiri rumah tangganya (bercerai) dengan tergugat (suami) karena tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan sering melakukan kekerasan kepadanya. Mendengar keluhan penggugat/tergugat, mediator menenangkanya kemudian Mediator memberikan arahan dan solusi yang begitu menyentuh kedua belah

pihak supaya tidak lagi mengulangi perbuatan yang tidak disenangi oleh masing-masing pihak.⁵

c.) proses tawar –menawar

Proses tawar- menawar adalah kegiatan dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan para pihak dan mediator. Proses tawar-menawar merujuk pada keadaan atau situasi bahwa satu pihak telah memberikan tawaran-tawaran konsesi-konsensi kepada pihak mitra runding untuk memperoleh imbalan konsensi sebaliknya dari mitra runding.⁶

Dari hasil wawancara penulis dengan mediator, Tawar-menawar sering dilakukan para pihak melalui hakim mediator. Mediator di pengadilan Agama Makassar memiliki langkah-langkah strategis dalam membimbing proses mediasi salah satunya menerapkan pertemuan terpisah (kaukus) secara berulang-ulang dari satu pihak dengan pihak lain. Mediator juga membantu para pihak dengan mengambil atau membuat tawaran atau konsesi dari satu pihak seolah-olah sebagai usulan mediator sendiri kemudian menyampaikan usulan itu kepada pihak lainnya.

⁵ Wawancara, Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar

⁶ Drs. Muh. Arief Musi (57 Tahun), Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 18 Desember 2014

b. Faktor Penghambat Mediasi

Faktor penghambat mediasi di pengadilan agama Makassar ada 3 (tiga) pertama tempat penyelenggaraan mediasi, kedua jumlah hakim yang terbatas dan keengganan para pihak bermediasi.

a) Tempat Pelaksanaan Mediasi

Tempat yang nyaman adalah salah satu faktor terealisasinya pelaksanaan mediasi. Dengan tempat yang nyaman pula sangat membantu para pihak yang bersengketa untuk memberikan atau mengeluarkan keterangan atas persoalan yang mereka hadapi. Dalam peraturan PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 20 memberikan aturan “ mediasi dapat diselesaikan disalah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau tempat lain yang disepakati oleh berbagai pihak. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya.

Di Pengadilan Agama Makassar, untuk tempat pelaksanaan mediasi dilaksanakan disalah satu ruangan pengadilan. Dari hasil pengamatan penulis di ruangan mediasi maupun hasil mewawancara para pihak, tempatnya tidak begitu nyaman untuk para pihak. Banyak alasan yang dikeluhkan oleh para pihak diantaranya, ruangnya panas, banyak orang di pengadilan sehingga ribut dan juga dalam ruangan mediasi ada orang lain yang tidak berkepentingan, yang seharusnya ruangan mediasi tidak boleh ada orang lain

selain para pihak dan mediator demi menjaga kerahasiaan persolan yang dihadapi oleh para pihak. Hal ini juga di kuatkan oleh wawancara langsung penulis dengan para pihak yang sudah melewati proses mediasi , 7 dari 10 para pihak menyatakan mereka tidak nyaman berada di ruangan mediasi.

b) Jumlah Mediator Yang Terbatas.

Hal ini mempengaruhi pula terhadap pelaksanaan mediasi dipengadilan. Lembaga penyedia jasa yang ada di Indonesia masih sangat minim, pada jumlah perkara perdata yang diajukan ke pengadilan terbilang banyak dan memerlukan mediator. Sampai saat ini jumlah mediator yang terdaftar di Pengadilan agama Makassar sebanyak 3 orang yaitu Drs. Arif musi. SH, Drs. Kamaruddin dan Hj. Nurjaya. MH. Dan jumlah hakim secara keseluruhan sebanya 18 orang.

Menurut hemat penulis dengan jumlah mediator yang terbatas sedangkan perkara mediasi yang masuk tiap bulannya mencapai ratusan perkara, maka pelaksanaan mediasi tidak berjalan efektif. Dalam PERMA No 1. Tahun 2008 ayat (1) mengijinkan hadirnya mediator bukan hakim yang bersertefikat disetiap pengadilan, Pengadilan Agama Makassar untuk mediator bukan hakim belum ada.

c) Keenganan Para Pihak Hadir dalam Proses Mediasi.

Ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak pada saat jadwal proses mediasi sangat menghambat pelaksanaan mediasi, karena dari keterangan para pihaklah seorang hakim mediator bisa mengetahui secara jelas apa yang menjadi penyebab sengketa serta apa yang diinginkan. Ketidakhadiran para pihak juga akan membuat hakim tidak bisa melakukan perundingan. dalam PERMA No1. Tahun 2008 tidak ada pasal yang memberikan sanksi bagi para pihak yang tidak hadir pada proses persidangan, sehingga keadaan ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengulur-ulur waktu.

Di pengadilan Agama Makassar ketidak hadirannya para pihak dalam proses mediasi sangat sering terjadi khusus dalam kasus perceraian. Ada beberapa alasan yang biasa disampaikan oleh para pihak supaya tidak menghadiri proses mediasi diantaranya kesibukan, sakit, belum siap berunding serta tidak niat untuk berdamai lagi. Kalau para pihak 2 sampai 3 tidak hadir memenuhi pemanggilan untuk proses mediasi maka hakim mediator menyatakan mediasi gagal dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

2. Keadaan Perkara Di Pengadilan Di Pengadilan Agama Makassar 2012-2014

Berdasarkan data yang penulis rangkum dari hasil penelitian di pengadilan Agama Makassar dari 2012-2014, perkara yang masuk 2012 sejumlah 2015 perkara, 2013 sebesar 2268, dan 2014 sebanyak 1618.

- a. Jumlah dan Jenis Perkara Yang Masuk Dari Tahun 2012 Tahun sampai 2014. Serta perkara yang dimediasi, berhasil dan tidak berhasil dimediasi

Tabel I: Perkara Masuk di Pengadilan Agama Makassar 2012

No	Jenis perkara	Jumlah perkara	Perkara yang dimediasi	Berhasil dimediasi	Tidak berhasil dimediasi
1.	Cerai talak	567	32	3	19
2.	Cerai gugat	1218	41	1	39
3.	Istibath nikah	30	30	-	30
4.	Kewarisan	23	33	1	32
5.	Penuj. Orang lain sebagai wali	16	35	1	34
6.	Pengangkatan anak	10	32	-	32
7.	Izin poligami	2	31	-	31
8.	FSHP/ penetaan ahli waris	86	20	-	20
9.	Pembatalan perkawinan	4	46	2	44
10.	Hibah	3	42	2	40

11.	Wali adhol	5	38	-	30
12.	Nafkah anak oleh ibu	4	36	1	35
13.	Ekonomi syariah	1			
14.	Dispensasi kawin	7			
15.	Harta bersama	13			
	Lain-lain	2			
	Jumlah	2015	416	11	396

Sumber: Pengadilan Agama Makassar.

Dari tabel diatas, perkara yang masuk ditahun 2012 sebanyak 2015 perkara yang masuk ditahap mediasi sebanyak 416 yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 11 perkara dan tidak berhasil 396. Menurut hemat penulis dari tingkat keberhasilan pengadilan agama Makassar ditahun 2012 dalam pelaksanaa mediasi masih kurang atau masih jauh dari harapan, dalam rangka mewujudkan peradilan cepat hemat dan berbiaya murah dan mengurangi penumpukan perkara. Menurut wakil panitra pengadilan agama Makassar kendala atau hambatan yang paling besar dihadapi oleh pengadilan agama Makassar sehingga pelaksanaan mediasi ditahun 2012 tidak efektif yaitu kurangnya hakim mediator. Hakim mediator yang terdaftar hanya 3 orang dari beberapa hakim yang ada di PA Makassar.⁷

⁷ Drs. Mulyaddin (64 Tahun), Wakil Panitra Pengadilan Agama Makassar. Wawancara, Makassar, 17 desember 2014

Tabel II: Perkara Yang Masuk Tahun 2013 di Pengadilan Agama Makassar.

No	Jenis perkara	Jumlah perkara	Perkara yang dimediasi	Berhasil dimediasi	Tidak berhasil dimediasi
1.	Cerai talak	562	39	-	31
2.	Cerai gugat	1374	49	1	38
3.	Istibath nikah	64	51	4	35
4.	Kewarisan	28	45	-	35
5.	Pengangkatan anak	13	51	6	47
6	Harta bersama	17	42	3	25
7.	Izin poligami	2	60	2	48
8.	FSHP/ penetaan ahli waris	110	23	1	19
9.	Pembatalan perkawinan	2	50	1	27
10.	Penguasaan anak	2	57	3	37
11.	Wali adhod	12	62	-	42
12.	Nafkah anak oleh ibu	5	62	2	46
13.	Perwalian	32			
14.	Dispensasi kawin	13			
15.	Harta bersama	17			
16.	Hal. Lain-lain	6			
	Jumlah	2268	603	23	430

Sumber: Pengadilan Agama Makassar

Dari table diatas perkara yang yang masuk tahun 2013 sebanyak 2268, perkara yang dimediasi sebanyak 603, berhasil dimediasi sebanyak 23 perkara tidak berhasil dimediasi 430 perkara. Tingkat keberhasilannya yang

dihasilkan oleh pengadilan agama Makassar pada tahun 2013 menurut penulis masih kurang atau belum efektif. kendala terbesar yang dihadapi oleh pengadilan agama Makassar pada tahun 2013 diantaranya keberdaan mediator yang masih kurang dan keenggana para pihak hadir pada saat proses mediasi

Tabel III: Perkara Yang Masuk di Pengadilan Agama Makassar 2014

No	Jenis perkara	Jumlah perkara	Perkara yang dimediasi	Berhasil dimediasi	Tidak berhasil mediasi
1.	Cerai talak	402	59	1	37
2.	Cerai gugat	1033	50	1	40
3.	Istibath nikah	49	57	1	52
4.	Kewarisan	11	45	1	44
5.	Pengangkatan anak	5	33	1	30
6	Harta bersama	7	34	2	32
7.	Izin poligami	-	15	-	15
8.	FSHP/ penetaan ahli waris	76	40	-	40
9	Penguasan anak	3	29	-	29
10	Wali adhod	3	26	2	22
11	Perwalian	11	40	1	29
12	Dispensasi kawin	9			
13	Hal lain-lain	9			
	Jumlah	1618	428	10	379

Sumber: Pengadilan Agama Makassar

Dari data tabel diatas perkara yang masuk dipengadilan agama Makassar pada tahun 2014 sebanyak 1618 perkara yang dimediasi sebanyak 428, berhasil dimediasi 10 perkara, yang gagal dimediasi sebanyak 379. Perkara yang masuk pada tahun 2014 menurun dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun sebelumnya, tetapi pelaksanaan mediasi masih menurut penulis belum efektif karena dari 428 perkara yang dimediasi hanya 10 yang berhasil. Adapun kendala terbesar yang dihadapi oleh pengadilan agama Makassar yaitu tidak adanya etiked baik para pihak.

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara yang masuk dari 2012-2014 sebanyak 5901 kasus dengan perincian sebagai berikut: cerai gugat 3679 kasus, cerai talak 1521 kasus, isbat nikah 143 kasus, kewarisan 66, FSHP penetapan ahli waris 272 kasus, pengangkatan anak 28 kasus, harta bersama 27 kasus, penguasa anak 15 kasus, wali adhol 20 kasus, despenisasi 29 kasus, pembatalan perkawinan 6 kasus, hibah 3 kasus, izin poligami 4, nafkah oleh ibu 9 kasus, perwalian 42 kasus, pengajuan orang sebagai wali 16 kasus dan lain-lain 17 kasus. Perkara yang dimediasi sebanyak 1447 perkara, berhasil dimediasi sebanyak 44 perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 1205 perkara.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan.*

1. 130 HIR dan 154 RBg sebagai dasar hukum acara dipengadilan serta dikembangkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah merumuskan beberapa ketentuan didalamnya, seperti hak dan kewajiban para pihak dan tugas serta wewenang mediator, kedua unsur ini sangatlah penting (*urgen*) dalam keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan. Dalam Pasal 8 PERMA No1 Tahun 2008 dijelaskan para pihak diberikan hak untuk memilih mediator yang akan menengahi perkara diantara mereka, akan tetapi hak tersebut tidak semua para pihak yang menjalani proses mediasi di pengadilan mendapatkannya, dikarenakan para pihak tidak diberitahu atau tidak ditawarkan oleh pihak pengadilan bahwa mereka diberikan kebebasan untuk memilih mediator.

2. Faktor pendorong proses mediasi di pengadilan agama Makassar: *pertama* ‘,adanya ektikad baik para pihak yang bersengketa atau berperkara’, *kedua* peran aktif hakim mediator dalam memberikan solusi-solusi yang menguntungkan kedua belah pihak sedangkan faktor penghambat proses mediasi di pengadilan agama Makassar, *pertama*’, keengganan para pihak hadir pada proses mediaisi’, *kedua*, tempat dan kualitas tempat mediasi yang tidak refresentatif’, *ketiga*, jumlah hakim mediator yang masih terbatas.

B. Implikasi Hukum

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa proses mediasi dapat menjadi solusi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, untuk itu perlu dilakukan upaya:

1. Agar pengadilan agama Makassar (penjabat) lebih mensosialisasikan dan mempublikasikan PERMA No 1 Tahun 2008 khususnya menyangkut hak serta kewajiban para pihak
2. Agar sebelum ketahap mediasi hakim harus memberikan informasi tentang manfaat mediasi bagi perkara yang dihadapi para pihak
3. Agar Pengadilan agama Makassar harus menambah jumlah hakim mediator dan disertai kemampuan *skill* yang baik sesuai dengan kearifan lokal.
4. Agar ketua pengadilan agama Makassar membenahi infrastruktur terutama ruangan mediasi, supaya memberikan rasa nyaman bagi para pihak

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN SKIRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian dan Landasan Yuridis Mediasi.....	14
B. Asas-Asas Hukum Perdata di Pengadilan.....	16
C. Prosedur Mediasi	22
D. Kerangka konseptual.....	29

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Pengelolaan Data	34

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Aturan Hukum Mediasi.....	34
1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	34
2. Tugas Dan Wewenang Mediator.....	41
B. Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Makassar	46
1. Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan mediasi	46
2. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Makassar	54

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Riwayat Hidup



Penulis bernama lengkap Muhammad Ilham dan biasa sapa Ilham, lahir di kabupaten Bima kecamatan Sape desa Naru Barat pada tanggal 10 Febuari 1992 merupakan anak bungsu atau terakhir dari lima saudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak H. Usman dan Ibu St. Hawa. Penulis sekarang bertempat tinggal di Tidung IX RT 10 RW 8 Kelurahan Mapalla Kec. Rapocini, kota Makassar.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD No 4 (empat) Sape di kabupaten Bima lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan di SMP negeri 1 (satu) Sape lulus pada tahun 2008, kemudian lanjut di SMA Negeri 1(satu) sape dan lulus 2011. Kemudian melanjutkan studi keperguruan tinggi Uneversitas Islam Negeri Alauddin, penulis lulus di UINAM melalui jalur SPMB dan Alhamdulillah lulus di jurusan Ilmu Hukum Syariah dan Hukum.

Di Uneversitas Islam Negeri Alauddin Makassar penulis masuk pada tahun 2011 sampai 2015 kurang lebih penulis menuntut ilmu selama 4 tahun, banyak suka duka yang penulis rasakan dan banyak pula lembaga-lembaga yang penulis masuki dari yang infra dan ekstra kampus seperti Taikowndo,HMI,PMII sebagai wadah tambahan bagi penulis mengaktualisasikan diri dan menambah pengetahuan.